

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Beberapa wilayah di Indonesia masih menghadapi berbagai permasalahan sosial dan ekonomi yang cukup kompleks. Permasalahan tersebut antara lain tingginya tingkat pengangguran dan kemiskinan yang berdampak pada terbatasnya kemampuan masyarakat dalam memperoleh pangan yang bergizi dan berkualitas. Kondisi ini menyebabkan sebagian kelompok masyarakat, khususnya kelompok rentan, mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan gizi harian secara memadai (Basuki, Muharrom, Kusuma, & Hadji, 2026). Keterbatasan akses terhadap makanan bergizi tidak hanya memengaruhi kondisi kesehatan masyarakat secara umum, tetapi juga memberikan dampak signifikan terhadap proses pertumbuhan dan perkembangan anak. Dalam jangka panjang, situasi tersebut berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan gizi, salah satunya adalah stunting. Stunting merupakan kondisi gagal tumbuh pada anak yang ditandai dengan tinggi badan yang lebih rendah dibandingkan standar usianya. Kondisi ini terjadi akibat kekurangan gizi kronis yang berlangsung dalam waktu lama, terutama pada periode awal kehidupan ketika kebutuhan nutrisi tidak terpenuhi secara optimal (Nurulaini & Afifah, 2025).

Permasalahan stunting masih menjadi tantangan besar bagi Indonesia karena berpotensi menghambat upaya pembangunan nasional, khususnya dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta mewujudkan generasi yang cerdas dan berdaya saing. Berdasarkan data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2022, prevalensi stunting di Indonesia masih tergolong tinggi, yaitu mencapai 21,6 persen. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa masalah gizi masih menjadi faktor yang dapat memperlambat kemajuan bangsa. Dampak stunting tidak hanya terlihat pada aspek kesehatan fisik dan perkembangan kognitif anak, tetapi juga berpotensi menurunkan tingkat produktivitas serta kualitas sumber daya manusia di masa mendatang (Ayuni, 2025).

Sebagai upaya untuk mengatasi berbagai tantangan tersebut, pemerintah meluncurkan Program Makan Bergizi Gratis. Program ini merupakan salah satu kebijakan strategis nasional yang dirancang untuk meningkatkan kualitas sumber daya

manusia melalui pemenuhan kebutuhan gizi bagi anak-anak usia sekolah. Kebijakan ini diarahkan untuk menanggulangi permasalahan gizi yang masih rendah, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta mengurangi beban ekonomi rumah tangga, khususnya bagi keluarga dengan kondisi ekonomi terbatas (Basit & Ramadani, 2025). Program tersebut juga sejalan dengan agenda pembangunan nasional yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, yang menempatkan peningkatan kesehatan dan status gizi masyarakat sebagai salah satu landasan utama dalam pembangunan manusia. Selain memiliki tujuan dalam bidang kesehatan dan sosial, Program Makan Bergizi Gratis juga memiliki relevansi ekonomi yang cukup penting. Kebijakan ini tidak hanya berorientasi pada pemenuhan hak anak untuk memperoleh asupan gizi yang layak, tetapi juga berpotensi menjadi salah satu instrumen yang mampu mendorong pergerakan ekonomi di tingkat lokal (Widyasari, Larasati, & Alam, 2025).

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) memiliki konsekuensi anggaran yang sangat besar dalam kebijakan fiskal negara. Pemerintah menetapkan pagu anggaran program ini sebesar sekitar Rp71 triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2025 sebagai bentuk komitmen dalam meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia. Namun dalam pelaksanaannya, realisasi anggaran program tersebut pada tahap awal tercatat sekitar Rp5,15 triliun atau sekitar 7,25 persen dari total pagu yang telah ditetapkan. Besarnya alokasi anggaran tersebut menunjukkan bahwa program MBG merupakan salah satu program prioritas nasional yang membutuhkan pengelolaan serta pengawasan yang optimal agar penggunaan anggaran negara dapat berjalan secara efektif, efisien, dan tepat sasaran (Irawati, 2026).

Meskipun memiliki tujuan yang strategis dalam meningkatkan kualitas gizi anak, implementasi Program Makan Bergizi Gratis juga menghadapi sejumlah persoalan di lapangan. Salah satu permasalahan yang mencuat adalah kasus keracunan makanan yang terjadi pada sejumlah lokasi pelaksanaan program. Berdasarkan berbagai laporan yang muncul selama pelaksanaan program, kasus keracunan makanan dari program MBG tercatat menimpa puluhan ribu siswa di berbagai daerah. Bahkan hingga akhir Oktober 2025, jumlah siswa yang dilaporkan mengalami gejala keracunan makanan akibat konsumsi makanan dari program MBG mencapai sekitar 16.109 siswa di berbagai

wilayah di Indonesia. Kasus tersebut menunjukkan adanya potensi kelemahan dalam proses pengawasan mutu makanan, standar keamanan pangan, serta mekanisme distribusi makanan kepada penerima manfaat. Permasalahan ini menimbulkan kekhawatiran terhadap kualitas pengelolaan program, terutama apabila standar higienitas, proses produksi, dan sistem pengawasan tidak diterapkan secara konsisten. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan program yang melibatkan distribusi makanan dalam skala besar membutuhkan sistem pengawasan yang ketat guna mencegah risiko kesehatan bagi penerima manfaat, khususnya anak-anak (Manulu, 2026).

Selain persoalan keamanan pangan, Program Makan Bergizi Gratis juga dinilai menghadapi berbagai tantangan dalam aspek tata kelola kebijakan. Sejumlah pengamat menilai bahwa implementasi program ini masih memiliki berbagai kelemahan struktural, mulai dari koordinasi antar lembaga yang belum optimal hingga mekanisme pengawasan yang belum terintegrasi secara menyeluruh. Program MBG sendiri melibatkan koordinasi lintas sektor yang cukup luas, setidaknya melibatkan lebih dari 10 kementerian dan lembaga pemerintah dalam proses implementasinya. Kompleksitas kelembagaan tersebut berpotensi menimbulkan tumpang tindih kewenangan, kurangnya kejelasan pembagian tugas antar institusi, serta risiko lemahnya akuntabilitas dalam pengelolaan program. Selain itu, sejumlah kritik juga menyoroti aspek transparansi dalam proses pengadaan bahan pangan, distribusi makanan, serta mekanisme evaluasi program yang dinilai belum sepenuhnya berjalan secara terbuka dan terukur. Permasalahan tata kelola tersebut berpotensi memengaruhi efektivitas pelaksanaan program serta menimbulkan risiko ketidaktepatan sasaran apabila tidak disertai dengan sistem pengawasan yang kuat dan akuntabel (Adri, 2026).

Dalam konteks sistem ketatanegaraan Indonesia, pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan publik merupakan salah satu tanggung jawab penting lembaga legislatif. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) merupakan lembaga perwakilan rakyat yang memiliki peran strategis dalam menjalankan fungsi kontrol terhadap jalannya pemerintahan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3), DPR RI memiliki tiga fungsi utama, yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Dalam menjalankan fungsi pengawasan tersebut, DPR RI juga dibekali dengan sejumlah hak konstitusional,

antara lain hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Melalui instrumen tersebut, DPR RI memiliki kewenangan untuk memastikan bahwa setiap kebijakan pemerintah dilaksanakan secara transparan, akuntabel, serta sesuai dengan kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, fungsi pengawasan DPR RI menjadi sangat penting dalam memastikan bahwa implementasi Program Makan Bergizi Gratis berjalan sesuai dengan tujuan kebijakan serta penggunaan anggaran negara dapat dipertanggungjawabkan secara baik.

Dalam konteks implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG), DPR RI memiliki peran penting dalam memastikan bahwa program tersebut dilaksanakan secara efektif, transparan, dan sesuai dengan tujuan kebijakan yang telah ditetapkan. Melalui fungsi pengawasan yang dimilikinya, DPR RI dapat melakukan berbagai bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan program oleh pemerintah, baik melalui rapat kerja dengan kementerian dan lembaga terkait, pembahasan laporan pelaksanaan program, maupun melalui kunjungan kerja ke daerah untuk meninjau langsung implementasi kebijakan di lapangan. Selain itu, DPR RI juga dapat mengevaluasi penggunaan anggaran yang dialokasikan untuk program MBG guna memastikan bahwa dana negara digunakan secara efisien, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Peran pengawasan ini juga mencakup upaya untuk mengidentifikasi berbagai kendala dalam pelaksanaan program, seperti permasalahan distribusi makanan, kualitas gizi, hingga aspek tata kelola program. Dengan demikian, fungsi pengawasan DPR RI menjadi instrumen penting dalam menjaga akuntabilitas pemerintah serta memastikan bahwa Program Makan Bergizi Gratis benar-benar mampu mencapai tujuan utamanya, yaitu meningkatkan status gizi anak dan mendukung pembangunan sumber daya manusia di Indonesia.

Di sisi lain, pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis juga menunjukkan adanya kecenderungan dominasi peran eksekutif dalam proses perumusan maupun implementasi kebijakan. Program ini dirancang dan dijalankan terutama oleh pemerintah pusat melalui kementerian dan lembaga terkait, sehingga kewenangan operasional, pengelolaan anggaran, serta mekanisme pelaksanaan sebagian besar berada di bawah kendali eksekutif. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan ketimpangan dalam mekanisme checks and balances apabila tidak disertai dengan pengawasan yang memadai

dari lembaga legislatif. Oleh karena itu, peran DPR RI melalui fungsi pengawasan menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang dijalankan oleh pemerintah tidak hanya berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, tetapi juga benar-benar mampu memberikan manfaat bagi masyarakat secara luas.

Kesenjangan penelitian (*research gap*) dalam kajian mengenai Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terletak pada masih terbatasnya penelitian yang secara khusus mengkaji peran lembaga legislatif, khususnya DPR RI, dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap implementasi program tersebut. Sebagian besar penelitian yang ada lebih banyak berfokus pada aspek kebijakan publik, efektivitas program, maupun dampak program terhadap peningkatan status gizi masyarakat dan penanggulangan stunting. Sementara itu, kajian yang menelaah secara mendalam bagaimana mekanisme pengawasan parlemen terhadap pelaksanaan program MBG, khususnya dalam memastikan akuntabilitas penggunaan anggaran, kualitas pelaksanaan program, serta kepatuhan terhadap ketentuan kebijakan, masih relatif terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya memberikan kontribusi akademik dengan menganalisis peran DPR RI dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap implementasi Program Makan Bergizi Gratis tahun 2025 dengan menggunakan perspektif teori pengawasan yang dikemukakan oleh Robbins & Coulter (2016:290).

Berdasarkan kondisi tersebut, kebaruan (*state of the art*) dalam penelitian ini terletak pada fokus analisis terhadap fungsi pengawasan DPR RI dalam konteks implementasi kebijakan nasional berskala besar yang berkaitan langsung dengan pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat. Penelitian ini tidak hanya menelaah implementasi kebijakan MBG dari perspektif kebijakan publik, tetapi juga mengkaji bagaimana proses pengawasan dilakukan oleh lembaga legislatif terhadap pelaksanaan program yang didominasi oleh peran eksekutif. Dengan menggunakan kerangka teori pengawasan dari Robbins & Coulter (2016:290), penelitian ini berupaya menjelaskan bagaimana proses pengawasan dilakukan melalui tahapan penetapan standar, pengukuran kinerja, serta tindakan korektif terhadap pelaksanaan kebijakan. Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai peran DPR RI dalam menjaga akuntabilitas pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis serta memperkuat mekanisme checks and balances dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

1.2 Rumusan Masalah

Latar belakang penelitian ini menggambarkan bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu kebijakan strategis pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pemenuhan kebutuhan gizi anak-anak usia sekolah. Program ini hadir sebagai respons terhadap berbagai permasalahan sosial dan ekonomi yang masih dihadapi masyarakat Indonesia, seperti tingginya angka kemiskinan, keterbatasan akses terhadap pangan bergizi, serta masih tingginya prevalensi stunting yang mencapai 21,6 persen berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia tahun 2022. Selain memiliki tujuan sosial dan kesehatan, program MBG juga memiliki implikasi fiskal yang besar dengan alokasi anggaran sekitar Rp71 triliun dalam APBN 2025. Namun demikian, dalam implementasinya program ini juga dihadapkan pada berbagai tantangan, mulai dari rendahnya realisasi anggaran pada tahap awal pelaksanaan, munculnya kasus keracunan makanan yang menimpa lebih dari 16.000 siswa di berbagai daerah, hingga persoalan tata kelola program yang melibatkan banyak kementerian dan lembaga sehingga berpotensi menimbulkan tumpang tindih kewenangan dan lemahnya koordinasi.

Berbagai dinamika tersebut menunjukkan bahwa implementasi Program Makan Bergizi Gratis tidak hanya berkaitan dengan keberhasilan kebijakan publik dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat, tetapi juga berkaitan erat dengan aspek akuntabilitas, transparansi, serta efektivitas pengelolaan program oleh pemerintah. Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintah merupakan salah satu fungsi penting yang dijalankan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI). Melalui fungsi pengawasan yang dimilikinya, DPR RI memiliki kewenangan untuk memastikan bahwa kebijakan pemerintah, termasuk program MBG, dilaksanakan secara tepat sasaran, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, serta menggunakan anggaran negara secara efektif dan bertanggung jawab. Namun demikian, meskipun program MBG merupakan kebijakan nasional yang melibatkan anggaran besar dan berdampak luas bagi masyarakat, kajian akademik yang secara khusus menganalisis bagaimana peran DPR RI dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap implementasi program tersebut masih relatif terbatas.

Untuk menjembatani kesenjangan kajian tersebut serta menjawab dinamika empiris yang terjadi dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis, penelitian ini merumuskan permasalahan pokok yaitu bagaimana peran DPR RI dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tahun 2025 dan bagaimana mekanisme pengawasan DPR RI dilakukan dalam memastikan akuntabilitas, efektivitas, serta transparansi pelaksanaan program tersebut. Pertanyaan penelitian ini akan menjadi dasar dalam menganalisis berbagai bentuk pengawasan yang dilakukan oleh DPR RI terhadap pemerintah dalam pelaksanaan program MBG, baik melalui mekanisme kelembagaan seperti rapat kerja, evaluasi kebijakan, maupun melalui penggunaan hak-hak konstitusional yang dimiliki oleh lembaga legislatif.

Pertanyaan analitis tersebut akan memandu penelitian untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai praktik pengawasan legislatif terhadap kebijakan publik berskala nasional. Analisis penelitian ini akan dilakukan dengan menggunakan kerangka teori pengawasan yang dikemukakan oleh Robbins & Coulter (2016:290), yang menjelaskan bahwa proses pengawasan meliputi tiga tahapan utama, yaitu penetapan standar kinerja, pengukuran pelaksanaan kebijakan, serta tindakan korektif terhadap penyimpangan yang terjadi dalam implementasi kebijakan. Melalui pendekatan tersebut, penelitian ini diharapkan dapat menjelaskan secara lebih mendalam bagaimana fungsi pengawasan DPR RI dijalankan dalam konteks implementasi Program Makan Bergizi Gratis serta bagaimana pengawasan tersebut berkontribusi dalam memperkuat mekanisme checks and balances dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang sudah dipaparkan, maka peneliti menyimpulkan pertanyaan dari penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana peran DPR RI dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tahun 2025?
2. Bagaimana mekanisme pengawasan DPR RI dalam memastikan akuntabilitas, efektivitas, serta transparansi pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tahun 2025?

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk memberikan pemahaman yang komprehensif dan mendalam terhadap pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan, khususnya terkait dengan peran lembaga legislatif dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap kebijakan publik. Penelitian ini berfokus pada analisis peran Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tahun 2025 sebagai salah satu program prioritas pemerintah dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat dan pembangunan sumber daya manusia.

Untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian ini diarahkan pada dua fokus utama yang selaras dengan kerangka teori pengawasan yang dikemukakan oleh Robbins dan Coulter. Tujuan pertama adalah untuk menganalisis dan mengidentifikasi bagaimana peran DPR RI dijalankan dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap implementasi Program Makan Bergizi Gratis. Analisis ini mencakup berbagai bentuk mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh DPR RI, seperti rapat kerja dengan kementerian dan lembaga terkait, evaluasi pelaksanaan kebijakan, serta pengawasan terhadap penggunaan anggaran negara yang dialokasikan untuk program tersebut.

Sementara itu, tujuan kedua adalah untuk menganalisis dan menginterpretasikan mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh DPR RI dalam memastikan akuntabilitas, transparansi, serta efektivitas pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis. Analisis ini akan dilakukan dengan menggunakan perspektif teori pengawasan Robbins dan Coulter yang menekankan pada tiga tahapan utama dalam proses pengawasan, yaitu penetapan standar pelaksanaan kebijakan, pengukuran kinerja program, serta tindakan korektif terhadap berbagai penyimpangan yang mungkin terjadi dalam implementasi kebijakan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai bagaimana fungsi pengawasan DPR RI berperan dalam menjaga akuntabilitas pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis serta memperkuat mekanisme checks and balances dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berarti, baik dalam pengembangan ilmu pengetahuan secara akademis maupun dalam penerapannya secara

praktis pada pelaksanaan kebijakan publik di Indonesia. Dengan mengkaji peran DPR RI dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tahun 2025, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai mekanisme pengawasan legislatif dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

1.5.1 Manfaat Teoritis

Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperkaya kajian ilmu politik dan administrasi publik, khususnya yang berkaitan dengan fungsi pengawasan lembaga legislatif terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintah. Kontribusi utama penelitian ini terletak pada upaya mengkaji secara mendalam praktik pengawasan DPR RI terhadap implementasi kebijakan publik yang berskala nasional, yaitu Program Makan Bergizi Gratis. Penelitian ini juga berupaya mengintegrasikan konsep fungsi pengawasan legislatif dengan kerangka teori pengawasan yang dikemukakan oleh Robbins dan Coulter, yang menekankan pentingnya proses penetapan standar, pengukuran kinerja, serta tindakan korektif dalam pelaksanaan pengawasan. Melalui pendekatan tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman konseptual yang lebih komprehensif mengenai bagaimana fungsi pengawasan DPR RI dijalankan dalam konteks pelaksanaan kebijakan publik serta bagaimana mekanisme pengawasan tersebut berperan dalam menjaga akuntabilitas dan efektivitas pelaksanaan program pemerintah. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi akademik bagi penelitian selanjutnya yang mengkaji peran lembaga legislatif dalam sistem checks and balances di Indonesia.

1.5.2 Manfaat Praktis

Selain memberikan kontribusi teoretis, penelitian ini juga diharapkan memiliki manfaat praktis bagi berbagai pihak yang terlibat dalam proses perumusan maupun pelaksanaan kebijakan publik. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi DPR RI dalam memperkuat pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap program-program pemerintah yang memiliki alokasi anggaran besar dan dampak luas bagi masyarakat. Temuan penelitian ini juga dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah, khususnya kementerian dan lembaga yang terlibat dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis, dalam meningkatkan kualitas tata kelola program,

transparansi penggunaan anggaran, serta efektivitas pelaksanaan kebijakan. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi akademisi, peneliti, serta pemerhati kebijakan publik dalam memahami dinamika hubungan antara lembaga legislatif dan eksekutif dalam proses pengawasan kebijakan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperkuat praktik pemerintahan yang akuntabel serta mendukung terciptanya mekanisme pengawasan yang efektif dalam sistem demokrasi di Indonesia.

1.6 Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah memahami terkait dengan pembahasan yang penulis coba bahas dalam penulisan penelitian ini secara keseluruhan, maka perlu dijelaskan sistematika penulisan sebagai kerangka dan acuan penulisan skripsi yang menjelaskan mengenai setiap bab pada penelitian skripsi. Adapun sistematika penulisan penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Bagian Awal Skripsi

Pada bagian awal penelitian ini, berisi tentang halaman judul, lembar pernyataan orisinalitas, lembar persetujuan dosen pembimbing, lembar pengesahan, abstraksi (Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris), kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, dan daftar singkatan.

2. Bagian Inti Skripsi

Bagian inti atau utama terdiri atas beberapa bab dan sub-bab, yaitu sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini merupakan bagian awal yang menjadi landasan utama dalam penelitian dengan memberikan gambaran mengenai latar belakang dilakukannya penelitian. Penjelasan dimulai dengan pemaparan mengenai berbagai permasalahan sosial dan ekonomi yang berdampak pada keterbatasan akses masyarakat terhadap pangan bergizi serta masih tingginya angka stunting di Indonesia. Kondisi tersebut mendorong pemerintah untuk meluncurkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai salah satu kebijakan strategis dalam meningkatkan kualitas gizi anak dan pembangunan sumber daya manusia. Bab ini juga menguraikan berbagai dinamika dalam implementasi program MBG, seperti besarnya alokasi anggaran negara, munculnya permasalahan dalam

pelaksanaan program, serta tantangan tata kelola kebijakan. Selain itu, bab ini menyoroti pentingnya peran DPR RI dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap implementasi program tersebut guna memastikan akuntabilitas, transparansi, serta efektivitas penggunaan anggaran negara. Pada bagian akhir, bab ini memaparkan rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan sebagai kerangka dasar penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab II disajikan kerangka pemikiran dan landasan teoretis yang digunakan sebagai dasar analisis dalam mengkaji fenomena yang diteliti. Peneliti memaparkan berbagai penelitian terdahulu yang relevan untuk menunjukkan posisi penelitian serta kebaruan (novelty) dari kajian ini. Landasan teori dalam bab ini difokuskan pada beberapa teori utama, yaitu Teori Pengawasan yang dikemukakan oleh Robbins dan Coulter yang menjelaskan proses pengawasan melalui tahapan penetapan standar, pengukuran pelaksanaan, serta tindakan korektif terhadap penyimpangan yang terjadi. Selain itu, dibahas pula Teori Implementasi Kebijakan Publik yang digunakan untuk menganalisis proses pelaksanaan kebijakan dari tahap perumusan hingga implementasi di lapangan. Pembahasan teori juga dilengkapi dengan Teori Checks and Balances yang menjelaskan peran lembaga legislatif dalam mengimbangi kekuasaan eksekutif guna mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*), serta Teori Good Governance yang menekankan pentingnya prinsip transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan partisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pada bagian akhir, bab ini menyusun kerangka berpikir yang menghubungkan konsep peran DPR RI, fungsi pengawasan legislatif, serta implementasi Program Makan Bergizi Gratis sebagai objek penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan metode penelitian yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk memberikan pemahaman secara mendalam mengenai peran DPR RI dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap implementasi Program Makan Bergizi Gratis. Bab ini menguraikan secara rinci teknik pengumpulan data yang digunakan, yaitu melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi. Informan dalam penelitian ini terdiri atas anggota DPR RI yang terkait dengan fungsi

pengawasan terhadap Program Makan Bergizi Gratis, pejabat kementerian atau lembaga yang terlibat dalam pelaksanaan program, serta akademisi atau pengamat kebijakan publik yang memiliki pemahaman terhadap implementasi kebijakan tersebut. Selain itu, bab ini juga menjelaskan lokasi penelitian, jenis dan sumber data, teknik penentuan informan, serta metode analisis data yang digunakan untuk memperoleh hasil penelitian yang valid dan sistematis.

BAB IV GAMBARAN UMUM

Bab ini menyajikan gambaran umum mengenai objek penelitian untuk memberikan konteks yang lebih jelas terhadap analisis yang dilakukan. Penjelasan diawali dengan pemaparan mengenai latar belakang kebijakan Program Makan Bergizi Gratis sebagai salah satu program prioritas pemerintah dalam meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia. Selanjutnya, bab ini menjelaskan struktur kelembagaan serta mekanisme pelaksanaan program yang melibatkan berbagai kementerian dan lembaga pemerintah. Bab ini juga menguraikan secara umum mengenai peran DPR RI sebagai lembaga legislatif dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, khususnya dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintah. Dengan adanya gambaran umum tersebut, pembahasan pada bab selanjutnya dapat dilakukan secara lebih terarah dan kontekstual.

BAB V ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan bagian inti dari penelitian yang memaparkan hasil temuan lapangan serta analisis terhadap data yang telah dikumpulkan. Dalam bab ini dijelaskan bagaimana peran DPR RI dijalankan dalam melakukan pengawasan terhadap implementasi Program Makan Bergizi Gratis tahun 2025. Analisis dilakukan dengan menggunakan kerangka teori pengawasan Robbins dan Coulter yang menekankan pada tahapan penetapan standar, pengukuran pelaksanaan program, serta tindakan korektif terhadap penyimpangan yang terjadi. Selain itu, bab ini juga membahas berbagai dinamika yang muncul dalam pelaksanaan program MBG, termasuk permasalahan yang terjadi di lapangan serta bagaimana DPR RI menjalankan fungsi pengawasannya dalam merespons berbagai isu tersebut. Melalui analisis ini, penelitian berupaya menjelaskan sejauh mana fungsi pengawasan DPR RI mampu memastikan akuntabilitas serta efektivitas pelaksanaan program MBG.

BAB VI PENUTUP

Bab ini merupakan bagian akhir dari penelitian yang memuat kesimpulan dan saran. Kesimpulan disusun berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan pada bab sebelumnya untuk menjawab rumusan masalah penelitian mengenai peran DPR RI dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap implementasi Program Makan Bergizi Gratis tahun 2025. Selain itu, bab ini juga menyajikan saran yang diharapkan dapat memberikan masukan bagi berbagai pihak, baik bagi lembaga legislatif dalam memperkuat pelaksanaan fungsi pengawasan maupun bagi pemerintah dalam meningkatkan tata kelola dan efektivitas pelaksanaan program MBG di masa mendatang. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam mendukung terciptanya pelaksanaan kebijakan publik yang lebih transparan, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.

